



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : V  
Rapat Ke : 11  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI  
Dengan : Kepala BPJPH Kementerian Agama RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024  
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1  
Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Acara : Pembahasan Penerapan Jaminan Produk Halal  
Ketua Rapat : H. Marwan Dasopang  
Sekretaris Rapat : Mc. Zaqqi Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.  
Hadir : 1. 43 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI;  
2. Kepala BPJPH Kementerian Agama RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang dengan didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag., dan Para Wakil Ketua Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., dan H. Abdul Wachid sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membahas “**Penerapan Jaminan Produk Halal dan Isu-isu Aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

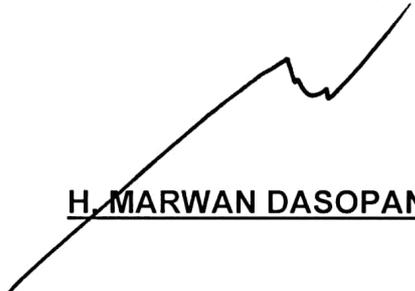
1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami capaian kinerja BPJPH tahun 2024, sampai dengan 2 Juli tahun 2024, dengan rincian:
  - a. Serapan anggaran yang mencapai 64,88 persen dari Pagu Anggaran Tahun 2024 yang sebesar Rp340.677.831.000,- (*tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
  - b. Kinerja sertifikasi halal *self declare* yang mencapai 847.258 produk dari target 1.000.000 produk dan sertifikasi halal reguler 8.318 yang mencapai 232.127 produk.
2. Komisi VIII DPR RI meminta BPJPH agar menyampaikan laporan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang diperoleh dari proses penerbitan sertifikat halal produk kepada Komisi VIII DPR RI.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BPJPH Kementerian Agama RI, agar dalam pelaksanaan jaminan produk halal dapat menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Mempercepat penerbitan sertifikat halal produk yang telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan.
  - b. Mempercepat sertifikasi halal *self declare* bagi produk yang diproduksi oleh UMK melalui kemudahan prosedur yang disosialisasikan secara aktif dan masif kepada pelaku usaha.
  - c. Memastikan produk impor yang beredar di Indonesia bersertifikat halal melalui peningkatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
  - d. Memastikan infrastruktur digital BPJPH aman dan mudah diakses sehingga mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal produk.
  - e. Memastikan bahwa rumah pemotongan hewan yang beroperasi di Indonesia bersertifikat halal dan melakukan pengawasan secara periodik.

- f. Mengupayakan untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) halal Indonesia di lembaga halal luar negeri yang bekerjasama dengan BPJPH.
- g. Memperkuat kapasitas kelembagaan BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal baik sebagai regulator maupun operator.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.25 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**



**H. MARWAN DASOPANG**